

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM KAITANNYA DENGAN
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN**

Misfi Laili Rohmi

Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Metro, Lampung
misfilailirohmi@metrouniv.ac.id

Desyria Pratiwi

Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Jakarta
desyria.pratiwi@akuntansi.pnj.ac.id

Annisa Alifa Ramadhani

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta
Annisa.alifa.r@akuntansi.pnj.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that is still being faced by the Indonesian people. Poverty is inseparable from the low quality of Human Resources (HR) which is rooted in the low quality of education and health. The government has made various efforts to overcome the problem of poverty, one of which is through the Family Hope Program (PKH) which focuses on increasing access to education and health for Beneficiary Families (KPM). This study intends to see how the Family Hope Program (PKH) is related in reducing poverty through improving the quality of education and health. This study is a type of library research with a qualitative descriptive approach. The research material is taken from various books, scientific journals and related research reports. The results of the literature review show that the Family Hope Program (PKH) is a social protection-based poverty alleviation program that can reduce poverty by improving the quality of human resources in the health and education sectors.

Keywords: *Family Hope Program (PKH), Quality of Human Resources (HR), health, and education*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Kemiskinan tidak lepas dari buruknya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan (KPM) bagi keluarga penerima manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan Program Perhetoivo (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan penelitian diambil dari berbagai buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian terkait. Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis perlindungan sosial yang dapat menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kata Kunci: *Program Keluarga Harapan (PKH), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, dan pendidikan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek dasar yang disebut dengan sumber daya manusia yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam melaksanakan jaminan sosial, pemerintah juga harus memperhatikan masalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan permasalahan serius yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemiskinan digambarkan sebagai kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kurangnya pendapatan menyebabkan buruknya kualitas hidup seseorang. Hal ini disebabkan masyarakat miskin tidak mempunyai kesempatan untuk menerima berbagai layanan yang meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat atas pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, jaminan pelayanan kesehatan, dan rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan tema sentral perjuangan rakyat, inspirasi dan perjuangan utama perjuangan kemerdekaan nasional, dan landasan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Menyadari betapa seriusnya permasalahan kemiskinan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah terus melakukan inovasi dan berbagai upaya untuk memutus lingkaran setan kemiskinan. Penting untuk diingat bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan analisis yang tepat dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kemiskinan bukan lagi sekedar permasalahan ketimpangan pendapatan, namun merupakan permasalahan yang lebih kompleks yang melibatkan kemampuan kerja, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta akses terhadap modal dan sumber daya atau kelangkaan manusia. Demikian pendapat Sen dalam artikel tersebut (Ustama, 2009). Elemen kunci dari keterampilan manusia adalah pendidikan, yang memainkan peran sentral dalam memecahkan masalah kemiskinan. Selain aspek pendidikan, dimensi kesehatan juga memegang peranan penting, buruknya kualitas kesehatan masyarakat menyebabkan rendahnya

produktivitas tenaga kerja yang berujung pada permasalahan keuangan. Pendekatan dengan dimensi berbeda tersebut diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak bersifat sementara namun berkelanjutan.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan kemudian dilaksanakan melalui Tim Nasional Pemajuan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan pertama merupakan serangkaian kebijakan yang berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai program yang memenuhi hak-hak dasar paling dasar masyarakat miskin dan rumah tangga, antara lain pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan keluarga sangat miskin (KSM) dapat merasakan langsung manfaatnya. Klasifikasi program ini meliputi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Keluarga Miskin (RASKIN), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, kelompok politik yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Ciri-ciri kebijakan ini adalah program yang didasarkan pada pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat secara individu dan kelompok, serta perencanaan keberlanjutan. Program tersebut bermanfaat bagi kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri. Kebijakan ketiga merupakan kelompok kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan pemberdayaan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini ditandai dengan program-program yang memberikan bantuan permodalan tingkat mikro, memperkuat kemandirian dunia usaha, dan meningkatkan pengelolaan usaha. Contohnya adalah Kredit Komersial Rakyat (KUR).

Selain ketiga alat utama pengentasan kemiskinan tersebut di atas, pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tentang Kelompok Kerja Pengembangan dan Perluasan Program Dukungan Masyarakat. Upaya peningkatan

dan perluasan program penunjang masyarakat (klaster IV) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Program perumahan sangat murah
- 2) Program transportasi umum yang terjangkau
- 3) Program air bersih untuk masyarakat
- 4) Program ketenagalistrikan yang terjangkau dan ekonomis
- 5) Program peningkatan taraf hidup nelayan
- 6) Program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pinggiran kota

Banyak sekali program pengentasan kemiskinan di Indonesia, namun kemiskinan hanya bisa diberantas melalui program pemberdayaan masyarakat dalam arti sempit. Pemberdayaan tampaknya hanya berupa pemberian modal usaha untuk membuka warung kecil di sudut desa, penyediaan sapi atau kambing untuk ternak, dan pelatihan lokakarya atau keterampilan vokasi. Asumsi sederhananya adalah jika masyarakat miskin mendapat modal dan pendidikan, maka mereka akan mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Kehidupan mereka akan membaik dan mereka tidak lagi miskin. Anggapan tersebut sudah menjadi keyakinan umum dan cenderung diperlakukan bahkan sebagai keyakinan mutlak (Edi Suharto, 2010). Dalam asumsi sempit mengenai inisiatif pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (FHP) berbeda dengan kebijakan pengentasan kemiskinan pada umumnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang kemudian disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui PKH, pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya dengan memberikan uang bantuan agar mereka dapat menyekolahkan anaknya dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013). PKH membantu mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yaitu mencapai pendidikan dasar, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesehatan ibu setelah melahirkan (Nainggolan et al., 2012). Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan Program Keluarga

Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta dengan harapan dapat memutus siklus kemiskinan. masa depan

2. TINJAUAN PUSTAKA

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Pengertian PKH

Berdasarkan pedoman umum, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan yang memberikan bantuan keuangan bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditunjuk sebagai peserta PKH untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. (Kementerian Sosial RI, 2013:17).

Dasar Hukum

Dasar hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah (Kementerian Sosial RI, 2013:20).

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Masyarakat Miskin
- c. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemajuan Penanggulangan Kemiskinan
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pemerataan Pembangunan, Lampiran 1 Peningkatan Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan.
- e. Instruksi Presiden Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Nomor 1, Lampiran 46 tentang Implementasi Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Keuangan Bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) Peserta Program Perhetoivo (PKH).

Tujuan PKH

Tujuan umum dari program Perhetoivo (PKH) adalah menurunkan angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan ini juga merupakan upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Tujuan khusus PKH adalah:

- a. Meningkatkan taraf pendidikan anak KPM
- b. Meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan nifas serta gizi anak balita

- c. Meningkatkan perolehan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

- d) Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi moral yang tinggi (Pasalong, 2013). Namun (Ndraha, 2012) pengertian kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif – generatif – inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya”

Indikator kualitas SDM meliputi (Sedarmayanti, 2009)

1) Kemampuan Fisik (kesehatan)

Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan daya tahan, keterampilan, kekuatan dan kualitas serupa. Meneliti ratusan persyaratan pekerjaan mengidentifikasi keterampilan utama yang berkaitan dengan melakukan tugas fisik. Indikator kemampuan jasmani (kesehatan) adalah kesehatan yang baik dan kehidupan yang layak dan manusiawi.

2) Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

Keterampilan intelektual adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Di sebagian besar masyarakat, masyarakat sangat menghargai kecerdasan, dan hal ini mempunyai alasan yang baik. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi pemimpin kelompok. Indikator pengukuran kemampuan intelektual (intelligence) adalah:

- a) Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
- b) Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang tersedia di tingkat lokal, nasional maupun internasional
- c) Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing

3) Kemampuan Psikologis (mental)

Keterampilan psikologis (mental) adalah keterampilan yang berkaitan dengan etika, tingkah laku, sikap dan fungsi mental seseorang yang ilmiah, biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menilai baik buruknya suatu situasi/ruang selama bekerja.

4) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi (Pasalong, 2013). Sedangkan Menurut (Ndraha, 2012) mengatakan bahwa pengertian kualitas sumber daya manusia, yaitu:

“Sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif – generatif – inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya”

Indikator kualitas SDM meliputi (Sedarmayanti, 2009)

1) Kemampuan Fisik (kesehatan)

Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan daya tahan, keterampilan, kekuatan dan kualitas serupa. Meneliti ratusan persyaratan pekerjaan mengidentifikasi keterampilan utama yang berkaitan dengan melakukan tugas fisik. Indikator kemampuan jasmani (kesehatan) adalah kesehatan yang baik dan kehidupan yang layak dan manusiawi. Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

Keterampilan intelektual adalah keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Di sebagian besar masyarakat, masyarakat sangat menghargai kecerdasan, dan hal ini mempunyai alasan yang baik. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi pemimpin kelompok. Indikator untuk mengukur kemampuan intelektual (intelligence) adalah:

- a) Anda memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi
- b) Anda memiliki pendidikan dan keterampilan yang beragam dan

- berkualitas tinggi yang relevan dengan dinamika kesempatan kerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- c) Anda fasih berbahasa, termasuk bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan setidaknya satu bahasa asing;
 - d) mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi persyaratan industrialisasi
- 2) Kemampuan Psikologis (mental)

Keterampilan psikologis (mental) adalah keterampilan yang berkaitan dengan etika, tingkah laku, sikap dan fungsi mental seseorang yang ilmiah, biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menilai baik buruknya suatu situasi/ruang selama bekerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Kajian sastra adalah kajian teori, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Evaluasi terhadap konsep dan teori yang digunakan pada bagian ini didasarkan pada literatur yang ada, khususnya artikel yang dimuat di berbagai publikasi ilmiah. Tugas tinjauan pustaka adalah membangun konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian (Sujarweni, 2014). Sebelum melakukan tinjauan pustaka perlu diketahui secara pasti dari sumber mana seseorang memperoleh informasi ilmiah (Sanusi, 2016). Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil penelitian berupa tesis, disertasi, tesis dan internet serta sumber lain yang relevan. Penelitian ini pada hakikatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis atas fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian (Sanusi, 2016). Langkah-langkah strategis penelitian deskriptif adalah sebagai berikut (Sanusi, 2016):

- a. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis kritis, teks merupakan objek yang pokok, bahan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir

pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

- c. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kaitannya dengan faktor-faktor lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) PKH dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Buku Sachs "The End of Proverty" menemukan bahwa salah satu mekanisme untuk mengakhiri kemiskinan adalah pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2006). Dengan pendidikan yang baik, setiap orang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, hingga menjadi lebih produktif hingga meningkatkan pendapatannya. Sebagaimana tujuan pendidikan untuk membentuk pribadi yang mempunyai kompetensi, karakter, dan visi yang menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menjadi sumber daya manusia pendukung pembangunan bangsa, maka peran pendidikan juga dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Pendidikan berperan dalam tahapan pengelolaan sumber daya manusia yaitu tahap rekrutmen. Pada tahap ini, pendidikan berperan sebagai penyedia sumber daya manusia yang berkualitas (Mantiri, 2019). Dengan demikian, pendidikan dapat memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia yang terdidik merupakan modal utama pembangunan negara, khususnya pembangunan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang terdidik maka semakin mudah suatu negara mengembangkan bangsanya. Sebab, sumber daya manusia telah memiliki keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga memudahkan pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional. Berinvestasi pada sumber daya manusia lebih menguntungkan, memiliki keuntungan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor fisik. Tidak mengherankan jika banyak negara di dunia dengan cepat merespons pentingnya investasi manusia sebagai prioritas utama investasi non-fisik. Menurut para ekonom klasik yang menyusun analisis tersebut, seperti Theodore Schultz, Harvey Leiben Stein dan Garry S Backer (1968), mereka menganggap pendidikan sebagai bagian dari investasi yang akan membawa keuntungan di masa depan (Hardianto, 2017).

Sektor pendidikan mampu memberikan hasil pendidikan yang unggul dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah atau negara. Pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ideologi, politik, masyarakat, ekonomi, dan budaya, sangat bergantung pada hasil pendidikan yang berkualitas. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan misalnya, lahir dari pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tidak perlu banyak melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, apabila proses pembelajaran telah berhasil membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait kesehatan. Dampak langsung dan tidak langsung juga berlaku pada sektor pembangunan lainnya, termasuk sektor yang paling penting, kehidupan bisnis.

Di sisi lain, pembangunan sektor pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Peningkatan produktivitas mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat mempunyai korelasi yang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, akan makin tinggi pula peran serta masyarakat. Dengan demikian, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi pula produktivitas masyarakat. Dengan kata lain, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi pula *income* perkapita masyarakat. Dengan demikian, sekali lagi pembangunan sektor pendidikan akan mengangkat secara langsung ataupun tidak langsung sektor ekonomi.

Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mendorong atau mempengaruhi perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (gelar universitas) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Iskarno et al., 2014). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto hampir 64% (Hardianto, 2017). Berdasarkan laporan UNESCO (2014), fakta serupa juga ditemukan di beberapa negara, di El Salvador, 47% pekerja dengan pendidikan menengah memiliki kontrak kerja yang menjamin hak-haknya. Di Uganda, pemilik usaha rumahan yang berpendidikan dasar memperoleh pendapatan 36 persen lebih tinggi dibandingkan mereka

yang tidak memiliki pendidikan menengah, dan pemilik bisnis rumahan yang memiliki pendidikan menengah memperoleh pendapatan 56 persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki pendidikan menengah. Di Thailand, studi 1 (satu) tahun dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 7%, terutama karena pekerja rumah tangga (laki-laki dan perempuan) biasanya dapat memperoleh keuntungan dari usahanya. Di Vietnam, keluarga dengan rumah tangga yang menyelesaikan sekolah dasar memiliki peluang sebesar 24% untuk keluar dari kemiskinan dalam empat tahun ke depan dibandingkan dengan keluarga tanpa pendidikan, sedangkan keluarga dengan pendidikan menengah memiliki peluang sebesar 31%. (World Bank et al., 2020).

Pendidikan mencegah penularan kemiskinan antar generasi. Di Guatemala, perempuan dengan pendidikan tinggi dan anak-anak mereka mempunyai peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pada gilirannya, setiap tingkat pendidikan yang diperoleh dapat meningkatkan pendapatan anak-anak hingga 10% saat mereka tumbuh dewasa dan bekerja, sementara meningkatkan nilai tes membaca dari 14 menjadi rata-rata 36 dapat meningkatkan pendapatan mereka sebesar 35%. Di Senegal, mewarisi tanah atau rumah tidak meningkatkan konsumsi masyarakat, namun anak-anak yang orang tuanya mengenyam pendidikan formal memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja di kegiatan non-pertanian untuk menghindari kemiskinan. Secara khusus, anak laki-laki dari ibu yang memiliki pendidikan formal di daerah pinggiran dan pedesaan mempunyai kemungkinan 27 persen lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di sektor non-pertanian.

Selain perubahan dalam dunia usaha, hasil yang diharapkan dari perkembangan pendidikan adalah perubahan sikap mental masyarakat, misalnya dalam bidang kesehatan. Pendidikan yang baik secara mendasar mengubah sikap mental atau kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, seperti bahaya narkoba bahkan HIV dan AIDS. Misalnya, di Zambia, kaum muda berusia 15-19 tahun yang berpendidikan menengah lebih kecil kemungkinannya tertular virus AIDS dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah (UNESCO). Pasal 65 Deklarasi Komitmen Sesi Khusus PBB tentang HIV/AIDS menyerukan peningkatan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendaftaran dan kehadiran di sekolah, serta penyediaan layanan

kesehatan dan gizi dasar untuk anak-anak. UNICEF (2004) menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup anak secara signifikan. Sekolah sangat berguna bagi setiap anak, namun sekolah juga dapat berperan sebagai pusat sumber daya yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, layanan kesehatan seperti vaksinasi, suplemen vitamin A, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan bayi, obat cacar, dan pengobatan penyakit anak secara komprehensif juga penting bagi anak-anak. Pelayanan kesehatan adalah kunci bagi kelangsungan kesejahteraan mereka.

Nielsen yang merupakan perwakilan UNICEF di Papua menyatakan dalam Laporan Tahunan Indonesia 2016 bahwa anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah memulai hidup mereka dalam keadaan yang sangat dirugikan (UNICEF Indonesia, 2016). Masa kanak-kanak tanpa pendidikan berarti masa depan tanpa peluang. Gunilla Olsson, Ketua UNICEF Indonesia, menyampaikan pernyataan serupa bahwa investasi pada anak memiliki dampak jangka panjang yang sangat baik. Tidak ada bangsa yang menjadi atau tetap kuat tanpanya. Investasi yang menjangkau anak-anak dan memberi mereka peluang untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka merupakan investasi terbaik bagi negara.

Analisis investasi kesehatan dan pendidikan diintegrasikan dengan pendekatan sumber daya manusia. Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk merujuk pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan manusia lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas ketika hal-hal tersebut ditingkatkan. Melihat Amerika Serikat, studi Dale Jorgensen (1987) menyatakan bahwa 46% pertumbuhan ekonomi Amerika disebabkan oleh pembentukan modal; 31% disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja dan sumber daya manusia, dan 24% disebabkan oleh perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh masyarakat. Angkatan kerja dan pertumbuhan sumber daya manusia jelas merupakan dua aspek yang berkaitan erat dengan kepribadian manusia. Pada saat yang sama, perkembangan teknis pada hakikatnya merupakan hasil kerja dan kreativitas manusia. Jadi setidaknya 55% pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor manusia (Puwanto, 2006).

Namun bayi baru lahir dan balita merupakan investasi negara dalam hal pembentukan sumber daya manusia. Dalam beberapa dekade mendatang, merekalah yang akan membangun perekonomian negara. Sebuah penelitian yang dipresentasikan di Program Kemiskinan Sektor Kesehatan Pusat menyimpulkan bahwa kekurangan gizi pada anak usia 0-3 tahun dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan otak dan fisik, sehingga membuat anak tersebut sakit saat dewasa. dan tidak cerdas sehingga tidak mampu bersaing dalam persaingan. Selain itu, stunting pada masa kanak-kanak sangat terkait dengan tingginya angka kesakitan di kemudian hari, serta rendahnya kemampuan kognitif dan pencapaian pendidikan.

Malnutrisi (malnutrisi kronis) dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang seperti kesehatan yang buruk, peningkatan risiko penyakit tidak menular, pencapaian kognitif dan pendidikan yang buruk di masa kanak-kanak, serta rendahnya upah dan produktivitas di masa dewasa. Terdapat bukti ekonomi yang dengan jelas menunjukkan pentingnya mengatasi segala bentuk masalah gizi: Indonesia kehilangan lebih dari \$4,3 miliar produk domestik bruto karena vitamin dan mineral, sementara intervensi gizi dapat menghasilkan laba atas investasi sebesar 8 banding 8. . 30 kali lebih banyak (Bappenas dan UNICEF, 2017).

Menyadari bahwa pendidikan dan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memutus siklus kemiskinan, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat. diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program yang merupakan bukti besar harapan pemerintah agar penerima manfaat tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya di kemudian hari, mengusung slogan "Saya miskin, tapi anak saya tidak boleh miskin". Dampak dari program ini baru akan terlihat dalam jangka panjang, ketika anak-anak sudah beranjak dewasa dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kesehatan dan pendidikan merupakan aset terpenting anak-anak ini untuk masa depan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan implementasi program Bantuan Tunai Bersyarat (CCT) di negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) merupakan bagian dari program pembangunan generasi baru yang bertujuan untuk membantu

meningkatkan akumulasi sumber daya manusia di kalangan generasi muda untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi (Bacarreza dan Ospina, 2015). CCT efektif digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik, khususnya di sektor kesehatan, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek dan merupakan investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Cara ini akan lebih efektif bila dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung (Shei et al., 2014).

Menurut Laporan Sosial Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2005, program bantuan langsung tunai (CCT) yang mendukung kelompok keluarga termiskin merupakan program yang sangat penting untuk mengubah struktur peluang masa depan masyarakat dan memainkan peran kunci dalam mengurangi pengungsi. dan kesenjangan antar generasi. Program Bolsa Familia di Brasil, yang merupakan program CCT terbesar di dunia, telah menunjukkan hasil yang sangat positif dalam hal tujuan dan dampaknya dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bolsa Familia saat ini mencakup 11,1 juta keluarga di seluruh Brasil dan berinvestasi pada sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia seperti pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam bentuk vaksinasi anak-anak dan pemeriksaan kesehatan pralahir (Hailu dan Soares, 2008).

Ide dasar dari program ini mirip dengan program CCT di Amerika Latin: menggabungkan tujuan jangka pendek untuk mengurangi kemiskinan melalui dukungan langsung dengan tujuan jangka panjang untuk menghilangkan perangkap kemiskinan antargenerasi melalui bantuan bersyarat. kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan program CCT dalam meningkatkan berbagai indikator kesejahteraan menjadi salah satu alasan mengapa program ini banyak diadopsi di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

2) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi terpenting dalam perekonomian. Sumber daya manusia seperti tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses produksi dan pembangunan. Peranan sumber daya manusia dalam proses produksi ditentukan oleh kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Dalam proses

pembangunan, dibutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi untuk meningkatkan produktivitas negara, sehingga sumber daya manusia merupakan alat yang sangat berharga dalam produktivitas tenaga kerja (Mankiw dan N.Gregory, 2013).

Secara umum pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya modal tetap sebagai akibat dari akumulasi proses pembangunan yang terus menerus, bertambahnya jumlah tenaga kerja, dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Pertumbuhan produktivitas merupakan sumber pertumbuhan yang tidak dihasilkan dari peningkatan penggunaan input atau sumber daya, namun dari peningkatan kualitasnya. Secara umum konsep produktivitas adalah perbandingan output dan input per satuan waktu. Produktivitas tenaga kerja adalah perubahan/peningkatan jumlah output yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, yang didefinisikan sebagai (Mankiw dan Gregory, 2015).

$$MPL \text{ (Marginal Product of Labour)} = \frac{\Delta \text{ output}}{\Delta \text{ input}}$$

Peningkatan produktivitas tenaga kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia (Siagian, 2002). Oleh karena itu, ini merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh dua hal diantaranya; Pertama, karena tingginya biaya pekerjaan, yang merupakan bagian dari biaya utama perolehan produk atau jasa; kedua, karena faktor lain seperti permodalan. Menurut Sinungan, produktivitas sangat penting karena pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) diperoleh dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas tenaga kerja. Secara umum pekerja produktif adalah pekerja yang dapat menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas tertentu dalam jangka waktu tertentu (Melmambessy Moses, 2012). Tingkat produktivitas tenaga kerja suatu daerah dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja, pendidikan yang mendekati pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta kesehatan yang mendekati angka harapan hidup (Nahar et al., 2015).

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan perilaku tenaga kerja dalam organisasi, oleh karena itu banyak program peningkatan produktivitas yang menjadikan topik-topik tersebut sebagai asumsi

dasarnya (Cardoso, 1995). Pertumbuhan produktivitas dapat dicapai dengan mengurangi segala jenis biaya sesedikit mungkin, termasuk menggunakan sumber daya manusia (do the right thing) dan meningkatkan produksi sebanyak-banyaknya (do the right thing). Dengan kata lain produktivitas mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara keseluruhan (Tarwaka et al., 2004). Produktivitas yang rendah sering dikaitkan dengan pencapaian pendidikan. Diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi potensi produktivitas yang dapat diraihinya.

Dalam kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja, pelatihan harus menjadi salah satu bentuk investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kerja. Dengan kata lain, informasi yang dimiliki oleh karyawan dapat secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas. Selain itu, pelatihan dapat menjadi landasan pengembangan diri pegawai yang mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi pendidikan angkatan kerja, maka produktivitas daerah tersebut cenderung meningkat dan pada akhirnya semakin besar pula peluang untuk meningkatkan produksi daerah tersebut. Hubungan antara pendidikan dan produktivitas tenaga kerja dapat tercermin pada tingkat pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memungkinkan pendapatan yang lebih tinggi.

Selain faktor pendidikan, produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh faktor kesehatan masyarakat dan gizi. Pekerja yang sehat jasmani secara alamiah lebih produktif dibandingkan pekerja yang mempunyai gangguan kesehatan. Dengan tenaga kerja yang berkualitas maka pembangunan kesehatan dapat berjalan lancar dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (Komaruddin, 1993), kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan, bukan sekedar masalah medis tetapi masalah sosial. . sasaran

Rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat buruknya kesehatan kemungkinan besar disebabkan oleh status ekonomi pekerja yang berada di bawah garis kemiskinan. Ragnar dan Nurkse (Komaruddin, 1993) berpendapat bahwa ada dilema. untuk menghubungkan kesehatan dengan produktivitas, yaitu kesehatan yang buruk menyebabkan

produktivitas yang rendah, produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah, konsumsi yang rendah dan kesehatan yang buruk. Semakin banyak pekerja di suatu wilayah yang menderita penyakit, maka vitalitas, produktivitas, dan efisiensinya hancur, bahkan inisiatif dan aktivitas sosial para pekerja pun melemah.

Pertumbuhan penduduk selalu dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk telah menyebabkan penurunan pendapatan per kapita, taraf hidup dan pembentukan modal, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja. Rendahnya produktivitas disebabkan karena pendidikan penduduk tidak memenuhi tuntutan dunia kerja. Keadaan ini disebabkan karena pemerintah tidak dapat melakukan investasi di bidang pendidikan (Sihombing, 2009). Kesempatan kerja, tingkat pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Artinya, kesempatan kerja yang lebih luas dan tingkat pendidikan yang memadai serta kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor penting yang bersama dengan beberapa faktor lain seperti faktor gaji, kesempatan kerja, suasana kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja juga dapat mengubah produktivitas kerja.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang diinisiasi dari harapan besar pemerintah bahwa anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan tumbuh sehat dan berpendidikan. Anak-anak adalah aset untuk pembangunan bangsa, melalui investasi pada bidang kesehatan dan pendidikan pemerintah berharap akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan menyumbang pada tingginya produktivitas tenaga kerja sehingga setiap individu berkesempatan memiliki pendapatan perkapita yang tinggi pula sehingga tidak lagi mewarisi kemiskinan dari orang tuanya.

b) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penurunan Angka Kemiskinan

Pelatihan mengacu pada pengembangan pengetahuan, kompetensi dan keterampilan orang dan karyawan dalam proses pengembangan. Pendidikan dikatakan sebagai sumber daya manusia karena memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang berpendidikan lebih tinggi umumnya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah (Biro dan Statistik, 2014). Berkat pendidikan yang layak, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan di masa depan. Hal ini konsisten dengan klaim Mankiw bahwa jika investasi di bidang pendidikan dilakukan secara merata, bahkan di masyarakat miskin, kemiskinan akan berkurang (Mankiw dan Romer, 1992).

Selain pada aspek pendidikan, perbaikan pada tingkat kesehatan juga perlu dilakukan karena pada dasarnya kesehatan merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikatornya akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik berupaya menjamin hak masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Anggaran kesehatan meningkat diiringi dengan kemiskinan yang semakin berkurang. Ada sebuah dampak signifikan pada alokasi anggaran kesehatan dalam mengurangi kemiskinan (Deffrinica et al., 2019).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan sejak tahun 2007 telah menunjukkan kinerja sebagai program sosial yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Merujuk data BPS hingga bulan september 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70%), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86%). Berdasarkan survei Kementerian Keuangan pada September 2017, jenis bantuan sosial PKH memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Angka kemiskinan turun tipis dari 10,96 persen menjadi 10,64 persen. Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan yang

tercermin dari koefisien gini juga turun dari 0,408 menjadi 0,393 (CNN Indonesia, 2017). Khofifah juga menerangkan dampak positif lain dari PKH adalah adanya 600.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah “lepas” dari status miskin menjadi sejahtera yang kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya. Peserta dinyatakan sejahtera dan tidak layak lagi mendapat bantuan PKH setelah melalui proses resertifikasi untuk menilai status kemiskinan setelah 6 (enam) tahun menjadi peserta. Indikator utama dalam resertifikasi adalah terjadinya peningkatan pendapatan, kepemilikan aset bergerak maupun tidak bergerak, serta kondisi fisik tempat tinggal.

KESIMPULAN

Program keluarga harapan (PKH) sebagai kebijakan klaster (perlindungan sosial) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan berperan penting dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat (KPM). Berinvestasi di bidang kesehatan dan pendidikan akan memberikan keuntungan yang lebih baik di masa depan dibandingkan berinvestasi di sektor fisik. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Pegawai sehat yang menguasai keterampilan informasi juga mempunyai produktivitas kerja yang baik. Akhirnya jebakan kemiskinan PKH (Program Keluarga Harapan) perlahan akan terlepas dan bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

KETERBATASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sebuah kebijakan publik tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) di tingkat sub daerah. Oleh karena itu, pemangku kepentingan harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung keberhasilan program ini. PKH juga harus berjalan paralel dengan program yang mendorong kemandirian peserta lainnya, seperti program pemberdayaan ekonomi kreatif. Selain itu, pemantauan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan program ini memenuhi tujuan dan kriteria kinerja. Dengan demikian subsidi yang disalurkan pemerintah membuahkan hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacarreza, G. C., & Ospina, M. (2015).
Intrahousehold Time Allocation : An

- Impact Evaluation Conditional Cash Transfer Programs. *Papers.Ssrn.Com*, 15. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2645096>
- Bank, W., Partnership, G., For, F., Development, S., & Annual, G. (2020). World Bank Group Partnership Fund For The Sustainable Development.
- Bappenas, & UNICEF. (2017). Laporan Baseline SGD tentang Anak-Anak di Indonesia.
- Bureau, U. S., & Statistics, L. (2014). Labor Force Characteristics by Race Ethnicity (Issue August).
- Cardoso, F. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset.
- CNN Indonesia. (2017). Program Keluarga Harapan Diklaim Efektif Tekan Kemiskinan.
- Deffrinica, Situmorang, D. M., Vuspitasari, B. K., & Hayet. (2019). The Effect Of Education, Health, Unemployment And Infrastructure On Poverty In Bengkayang Regency. *Management and Sustainable Development Journal*, 01(1), 17–25. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012067>
- Edi Suharto. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT.Refika Aditama.
- Hailu, D., & Soares, F. V. (2008). Cash Transfers in Africa and Latin Amerika: An Overview (Issue 15).
- Hardianto. (2017). Pengaruh Ekonomi Terhadap Pendidikan Dan Peran Pendidikan Membangun Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Islam Vol.*, 6(1), 18–36.
- Iskarno, P. E., Kuncara, H., & Irianto, D. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2008-2012). 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JP.EB.002.1.9>
- Kementerian Sosial RI. (2013). Pedoman Umum PKH. Kementerian Sosial RI.
- Komaruddin. (1993). Pengantar Kebijakan Ekonomi. Bumi Aksara.
- Mankiw, G., & Romer, D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Oxford University Press.
- Mankiw, & Gregory, N. (2015). Principles of Economics. Cengage Learning.
- Mankiw, & N.Gregory. (2013). Macroeconomics (8th end). Worth Publishers.
- Mantiri, J. (2019). Peran Pendidikan Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.904>
- Melmambessy Moses. (2012). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. *Media Riset Dan Manajemen*, 12.
- Nahar, M., Arshad, M., Malik, Z. A., Sciences, M., & Gombak, J. (2015). Quality Of Human Capital And Labor Productivity : A Case Of Malaysia. 1(1), 37–55. <https://journals.iium.edu.my/enmjourn/index.php/enmj/article/view/289/185>
- Nainggolan, T., Sutaat, Sitepu, A., Padmi, T. A., Muchtar, Irmayani, & Hutapea, B. (2012). Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi (Issue December 2012). P3KS Press. [http://puslit.depsos.go.id/download/pdf/isi/PKH PDF Lengkap.pdf](http://puslit.depsos.go.id/download/pdf/isi/PKH%20PDF%20Lengkap.pdf)
- Ndraha, T. (2012). Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta.
- Pasalong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
- Puwanto, N. A. (2006). Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara. 02, 1–7.
- Sachs, J. D. (2006). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Penguin Books.
- Sanusi, A. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. CV Mandar Maju.
- Shei, A., Costa, F., Reis, M. G., & Ko, A. I. (2014). The Impact of Brazil ' s Bolsa Família Conditional Cash Transfer Program on Children ' s Health Care Utilization and Health Outcomes. 1–9.
- Siagian, S. P. (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineka Cipta.
- Sihombing, D. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. IV(1), 1–13. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/174/206>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). Metodologi Penelitian.

Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tarwaka, HA, S., & L, S. (2004). Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas. UNIBA PRESS.

UNICEF Indonesia. (2016). Laporan Tahunan Indonesia 2016.

Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1–12.